BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu (Dwi, 2022). Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Agusputri & Sofie, 2019). Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan dan juga menunjukkan bagaimana tanggung jawab pihak manajemen atas kinerjanya untuk perusahaan (Budiyanto & Puspawati, 2022).

Perusahaan selalu menginginkan kondisi keuangan dalam keadaan baik, namun ada kalanya tujuan tersebut tidak dapat tercapai sehingga bisa menimbulkan adanya manipulasi laporan keuangan agar perusahaan dapat menampilkan gambaran yang baik. Ketika sudah terjadi manipulasi, informasi yang disampaikan di dalamnya dianggap tidak valid sehingga tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan ketika laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat menimbulkan suatu tindakan kecurangan atau *fraud* (Anggarani *et al.*, 2023).

Kecurangan dalam "*fraud*" yang dimaksud adalah segala perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan aspek pelanggaran hukum ataupun aturan. Kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah tindakan ilegal yang dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok demi mendapatkan keuntungan yang dapat merugikan pihak lain. *Fraud* dalam suatu perusahaan dapat terjadi apabila ada jalinan kerja sama antara beberapa pihak yang terkait dengan entitas misalnya seperti dewan direksi, pihak manajemen, akuntan publik serta internal auditor (Arifin, 2020). *Fraud* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja, atau dalam kata lain bahwa *fraud* berbeda dengan kekeliruan (*errors*) yang tindakan dasarnya dilakukan secara tidak sengaja (Tunggal, 2016).

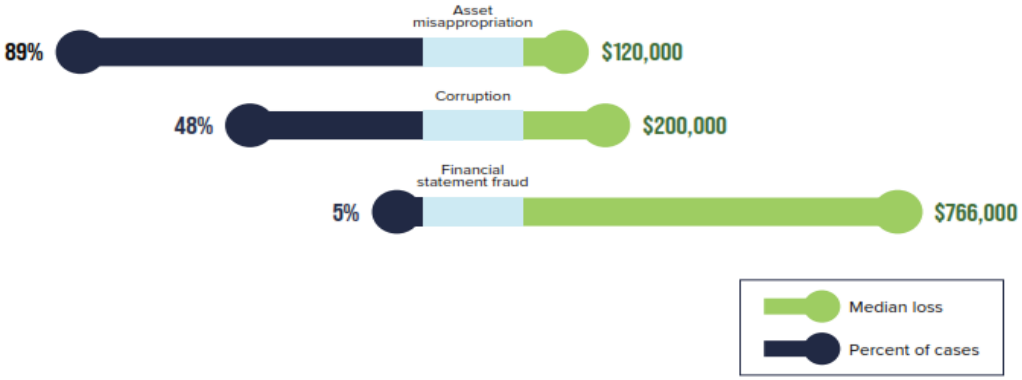

Sumber: *Occupational Fraud* 2024: *Report To The Nation* (2024) oleh ACFE

Gambar 1. 1
Tiga Kategori Utama Skema Penipuan Kerja

Gambar 1.1 merupakan tiga kategori utama terkait dengan skema penipuan kerja yang dilaporkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* dalam *A Report To The Nations* 2024 yaitu ada *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *corruption* (korupsi) dan *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan). Penyalahgunaan aset merupakan kasus *fraud* yang paling umum terjadi yaitu 89% kasus dengan median kerugian terendah sebesar USD 120,000. Lalu ada korupsi yang menyebabkan kerugian sebesar USD 200,000 dengan 48% kasus. Di urutan ketiga terdapat kecurangan laporan keuangan dengan 5% kasus yang merupakan *fraud* paling tidak umum terjadi, namun menghasilkan kerugian terbesar yaitu USD 766,000.

Tabel 1. 1
Tiga Kategori Utama Skema Penipuan Kerja Selama 2 Laporan Terakhir

Jenis *Fraud*	2020		2022	
	Persentase Kasus	Median Kerugian	Persentase Kasus	Median Kerugian
Penyalahgunaan Aset	86%	$100.000	86%	$100.000
Korupsi	43%	$200.000	50%	$150.000
Kecurangan Laporan Keuangan	10%	$954.000	9%	$593.000

Sumber: Hasil olah data ACFE

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat perbandingan persentase kasus dan median kerugian yang dihasilkan oleh tiga jenis *fraud* yaitu ada penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan laporan keuangan. Data didapatkan dari laporan yang dikeluarkan oleh ACFE dalam dua laporan terakhir yaitu tahun 2020 dan 2022. Dapat disimpulkan bahwa kasus kecurangan laporan keuangan pada setiap tahun laporan memang selalu berada pada persentase kasus terendah, namun selalu menghasilkan median kerugian terbesar dibandingkan dengan Penyalahgunaan aset ataupun Korupsi.

Kecurangan (*fraud*) laporan keuangan merupakan suatu pernyataan palsu atau salah pernyataan, termasuk di dalamnya tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya (ACFE). Salah saji yang dilakukan secara sengaja adalah seperti penghilangan jumlah tertentu, dan juga pengungkapan informasi akuntansi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk kepentingan individu atau kelompok (Precilia *et al.,* 2022). *Conflict of interest* atau konflik kepentingan yang terjadi antara pihak *agent* dan *principal* biasanya menjadi latar belakang sebab terjadinya suatu tindakan *fraud*, yang membuat timbulnya kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan (Prakoso & Setiyorini, 2021).

Pihak *agent* atau manajemen menginginkan kompensasi yang besar, sementara pihak *principal* atau pihak pemegang saham menginginkan pengembalian yang tinggi (Imtikhani & Sukirman, 2021). Sesuai dengan teori agensi yang diusulkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menyatakan bahwa pemegang saham dan manajemen memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pihak manajemen memiliki lebih banyak akses terkait informasi internal perusahaan daripada pihak pemegang saham. Hal ini memungkinkan pihak manajemen untuk menyembunyikan informasi, yang mendorong suatu tindakan kecurangan (Kusumosari & Solikhah, 2021). *Fraud* merupakan fenomena yang tidak asing terjadi dalam konteks dunia bisnis dan keuangan. Meskipun mungkin jarang terjadi dalam skala besar, namun tetap memiliki potensi dampak yang signifikan baik terhadap reputasi perusahaan

maupun terhadap reputasi publik. Berikut adalah data Sektor yang terdampak oleh adanya suatu tindakan *fraud*:

Tabel 1. 2
Sektor Yang Terpengaruh Oleh *Fraud*

No.	*Sector*	Sektor	Median Kerugian
1	*Mining*	Pertambangan	$550.000
2	*Whosale Trade*	Perdagangan Grosir	$361.000
3	*Manufacturing*	Manufaktur	$267.000
4	*Construction*	Konstruksi	$250.000
5	*Government and Public Administration*	Pemerintahan dan Administrasi Publik	$200.000
6	*Real Estate*	Perumahan	$200.000
7	*Insurance*	Asuransi	$190.000
8	*Services (Other)*	Pelayanan	$170.000
9	*Information (publishing, media, telecommunication)*	Informasi (Penerbitan, media, telekomunikasi)	$166.000
10	*Agriculture, forestry, fishing, and hunting*	Pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan	$165.000
11	*Energy*	Energi	$152.000
12	*Technology*	Teknologi	$145.000
13	*Transportation and warehousing*	Transportasi dan Pergudangan	$121.000
14	*Banking and Financial Services*	Perbankan dan Jasa Keuangan	$120.000
15	*Utilities*	Keperluan	$100.000
16	*Services (Professional)*	Layanan (Profesional)	$100.000
17	*Health Care*	Kesehatan	$100.000
18	*Foof service and Hospitality*	Layanan Makanan dan Perhotelan	$100.000
19	*Religious, Charitable, or Social services*	Layanan Keagamaan, Amal, atau Sosial	$85.000
20	*Education*	Pendidikan	$50.000
21	*Retail*	Ritel	$48.000
22	*Arts, Entertainment, and recreation*	Seni, Hiburan, dan Rekreasi	$44.000

Sumber: Hasil olah data ACFE

Tabel 1.2 merupakan daftar secara global, terdapat 22 sektor yang terdampak dari adanya *fraud*. Survei ACFE 2024 melaporkan bahwa sektor yang paling banyak dirugikan oleh *fraud* adalah sektor pertambangan (*mining*) dengan median kerugian yang dihasilkan mencapai USD 550,000. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memilih sektor pertambangan sebagai objek yang akan diteliti karena median kerugian pada sektor pertambangan adalah yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Dalam *Report To The Nations* (RTTN) yang diterbitkan oleh ACFE, terdapat juga informasi yang berkaitan dengan kasus *fraud* yang terjadi di berbagai wilayah termasuk Asia Pasifik yang mana Indonesia termasuk ke dalam wilayah tersebut. Berikut adalah data kasus *fraud* berdasarkan negara/wilayah di wilayah Asia Pasifik:

Tabel 1. 3
Kasus *Fraud* Menurut Negara/Wilayah Di Wilayah Asia Pasifik

No.	2020		2022		2024	
	Negara	**Jumlah Kasus *Fraud***	**Negara**	**Jumlah Kasus *Fraud***	**Negara**	**Jumlah Kasus *Fraud***
1	**Indonesia**	**36**	Australia	38	China	33
2	China	33	China	33	Australia	29
3	Australia	29	Malaysia	25	**Indonesia**	**25**
4	Philippines	24	**Indonesia**	**23**	Malaysia	17
5	Malaysia	19	Singapore	13	Singapore	15

Sumber: Hasil Olah Data ACFE

Tabel 1.3 merupakan perbandingan jumlah kasus *fraud* pada negara yang terdapat di wilayah Asia Pasifik dalam tiga laporan terakhir yang dikeluarkan oleh ACFE. Pada tahun 2020 jumlah kasus *fraud* di Indonesia adalah 36, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus *fraud* terbanyak di wilayah Asia Pasifik. Di tahun 2022, jumlah *fraud* menurun menjadi 23 kasus. Namun pada tahun 2024, *fraud* Indonesia kembali mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 25. Sehingga dapat terlihat pada laporan tahun 2024, Indonesia masuk ke dalam tiga besar

negara di Asia Pasifik dengan jumlah kasus *fraud* terbanyak. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih tingginya angka kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia.

Terdapat kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada sektor pertambangan. Kasus kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terjadi salah satunya yang dilaporkan oleh *Hindenburg Research*. *Hindenburg Research* ini adalah perusahaan investasi AS yang beberapa kali mengumumkan laporan adanya dugaan kecurangan terkhusus secara keuangan pada perusahaan besar yang ada di dunia, seperti Adani Grup milik pengusaha Gautam Adani asal India. Adani grup memiliki beragam bisnis yang dijalankan, dengan pertambangan yang menjadi salah satu usahanya. Pada bulan Januari 2023, *Hindenburg Research* mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa Adani Grup telah melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan wilayah yang bebas pajak, dengan dibuatnya perusahaan cangkang di wilayah-wilayah tersebut. Adani Grup juga melakukan tindakan manipulasi saham atau kenaikan harga saham yang tidak wajar selama puluhan tahun, dijelaskan jika Adani Grup yang bertempat di luar negara India akan mengirimkan uang ke unit perusahaan yang sedang menjual saham dengan tujuan untuk membuat harga saham perusahaan menjadi tinggi. *Hindenburg* juga menyampaikan adanya praktik *short selling* atau penjualan saham untuk kemudian di beli kembali dengan harga yang lebih murah (Ramli & Djumena, 2023). Sehingga dalam hal ini, perusahaan memiliki kemungkinan besar dalam praktik kecurangan terhadap laporan keuangannya, karena tidak menunjukkan kondisi laporan yang sebenarnya. Kasus lainnya yaitu perusahaan PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), yang merupakan perusahaan tambang emas di Indonesia. Pada tahun 2021, SRM diduga telah memanipulasi laporan hasil produksi tambang emas yang berpotensi merugikan negara Rp 74,438 miliar per tahun akibat tidak membayar pajak dan kewajiban lainnya terhadap negara. Dugaan tersebut karena laporan fiktif yang dilakukan SRM kepada PT Antam, berkaitan dengan hasil produksi yang jika berdasarkan ketentuan seharusnya wajib dijual seluruhnya kepada PT Antam, namun ternyata hasil produksi sebagian besar telah dijual oleh SRM di pasar gelap, dan hanya sebagian kecil saja yang dijual kepada PT Antam (Firmino, 2021). Berdasarkan

uraian data kasus tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan Sektor Pertambangan, sehingga diperlukannya suatu identifikasi pada faktor risiko yang dapat menyebabkan kecurangan laporan keuangan terjadi dalam suatu perusahaan.

Teori yang disampaikan oleh seorang penerjemah, sosiolog dan kriminolog asal Amerika serikat bernama Donald R. Cressey (1953), mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya *fraud* diantaranya ada faktor tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan (*pressure*) adalah situasi di mana seseorang memiliki insentif atau suatu tekanan sehingga mendorong untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan *Statement on Auditing Standard* (SAS) No. 99, terdapat 4 situasi yang menyebabkan seseorang merasa mendapatkan tekanan (*pressure*) sehingga menimbulkan terjadinya kecurangan laporan keuangan, yaitu ada stabilitas keuangan, target keuangan, tekanan eksternal dan kebutuhan keuangan pribadi. Namun pada penelitian yang akan dilakukan hanya satu, target keuangan. Menurut Jao *et al.,* (2020), tekanan dapat timbul dalam proses penetapan target leuangan yang terlampau tinggi diberikan oleh pihak pemegang saham. Hal tersebut dapat terjadi karena target keuangan yang terlalu tinggi memberikan suatu tekanan yang berlebih pada perusahaan untuk dapat meraih target yang telah ditetapkan, dan dapat membuat munculnya potensi suatu tidak kecurangan pada laporan keuangan.

Selanjutnya ada rasionalisasi (*rationalization*) yaitu situasi di mana seseorang membenarkan perbuatan tidak jujur yang telah dilakukan, sikap atau etika yang membuat seseorang merasa bahwa perbuatan tersebut dapat diterima meskipun pada kenyataannya bertentangan dengan prinsip kejujuran. Rasionalisasi ini secara umum berkaitan dengan pergantian auditor. Penelitian Skousen *et al.*, (2008) mengungkapkan bahwa insiden kegagalan audit dan litigasi meningkat secara langsung setelah adanya pergantian auditor. Menurut Santoso (2019), pelaku kecurangan dapat memiliki asumsi bahwa perbuatan *fraud* yang telah dilakukan tidak akan terdeteksi karena adanya pergantian auditor baru yang di mana pelaku *fraud* beranggapan bahwa auditor baru tersebut tentu belum memahami bagaimana situasi perusahaan dengan baik. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Azizah *et al.*, (2022), menghasilkan bahwa target keuangan dan pergantian auditor berpengaruh dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sehingga merujuk pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan variable target keuangan dan pergantian auditor untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara target keuangan yang dipengaruhi oleh adanya tekanan, serta pergantian auditor yang dipengaruhi rasionalisasi terhadap keputusan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan dalam suatu perusahaan.

Faktor pertama adalah target keuangan. Dapat dikatakan bahwa tujuan utama perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya adalah untuk memperoleh laba, yang mana pada umumnya laba juga dianggap sebagai pencapaian suatu perusahaan. Dalam hal ini, perolehan laba yang ingin dicapai tersebut telah diperhitungkan dengan cara menentukan targetnya terlebih dahulu. Dengan adanya target dalam suatu perusahaan, pihak manajemen akan mengerahkan segala usahanya agar dapat bekerja dengan maksimal. Kinerja pihak manajemen ini dapat terlihat dari kemampuannya dalam menghasilkan laba (Sinaga & Wangdra, 2022). Berikut adalah data grafik pertumbuhan laba sektor perusahaan pertambangan periode 2019-2023:

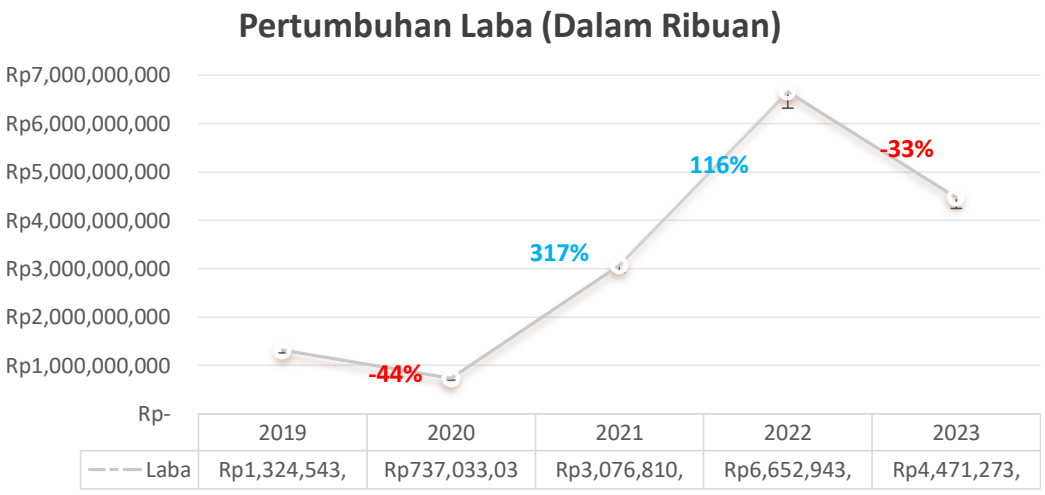

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Grafik 1. 1
Laba Bersih Sektor Pertambangan Periode 2019-2023

Berdasarkan grafik 1.1, pada tahun 2020 pertumbuhan laba mengalami penurunan sebesar 44% dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2021 dan 2022 laba bersih perusahaan mengalami pertumbuhan, beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan laba signifikan adalah ADRO dan MBAP. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan laba menurun kembali sebesar 33%. Dalam hal ini sebagian besar perusahaan mengalami penurunan laba bersih yang dihasilkan, termasuk ADRO dan MBAP. Data yang telah diolah oleh peneliti tersebut mengindikasikan adanya fluktuasi dalam pertumbuhan laba pada perusahaan sektor pertambangan, hal ini juga menandakan adanya ketidakstabilan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Manajemen perusahaan akan mengupayakan segala cara untuk membuat laba yang dihasilkan menjadi lebih stabil dari waktu ke waktu karena ketika angka laba yang dihasilkan bersifat stabil menunjukkan adanya keberhasilan kinerja manajemen perusahaan dalam pencapaian laba (Sumani, 2017). Salah satu kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan laba yaitu perusahaan PT Timah Tbk (TINS), pihak manajemen Timah merevisi data laporan keuangan tahun 2018. Perubahan data tersebut berkaitan dengan laba bersih yang sebelumnya berjumlah Rp 531,35 miliar per tanggal 31 desember 2018, telah direvisi menjadi Rp 132,28 miliar. Hal ini menyebabkan perolehan laba bersih menurun sebesar 73,67% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang melaporkan perolehan laba sebesar Rp 502,43 miliar (Jatmiko, 2020). Terdapat analisis yang mengungkapkan bahwa alasan PT Timah melakukan hal tersebut adalah karena ingin menunjukkan laba yang tinggi dengan mengurangi beban pokok penjualan. Secara umum, perusahaan menginginkan beban yang rendah dengan tujuan untuk memberikan pembuktian bahwa pengelolaan beban perusahaan berjalan dengan baik. Sehingga akhirnya hal ini akan mendorong perusahaan melakukan suatu tindakan *fraud* (Harsono *et al.,* 2022). Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat terlihat bahwa kinerja perusahaan yang sebenarnya sedang tidak berjalan dengan baik. Menurut Agusputri & Sofie (2019), ketika kinerja perusahaan sedang tidak baik, menyiratkan bahwa adanya kegagalan perusahaan dalam pencapaian target keuangan

yang sudah ditetapkan sehingga dapat mengakibatkan suatu tindak kecurangan terhadap laporan keuangan. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan akan melakukan berbagai cara agar target keuangan dapat terealisasi.

Target keuangan merupakan sasaran dalam bentuk keuntungan atau laba atas operasional usaha yang akan/hendak dicapai oleh manajemen perusahaan yang sebelumnya sudah ditentukan. Salah satu rumus yang dapat digunakan untuk mengukur nilai laba yang dihasilkan atas usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut adalah dengan *return on assets* (ROA). ROA sering digunakan untuk menilai kinerja manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai proksi dari target keuangan (Skousen *et al.,* 2008). Dalam hal ini ROA memperlihatkan besarnya tingkat pemulihan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga, semakin besar nilai ROA yang dapat dicapai oleh perusahaan maka mengindikasikan performa manajemen akan semakin baik dan operasional perusahaan sudah efektif. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi target keuangannya, maka performa perusahaan akan bertambah baik. Namun sering kali terdapat kondisi yang mana pihak manajemen merasakan suatu tekanan atas pemenuhan target keuangan yang telah ditentukan, hal ini membuat pihak manajemen dalam proses mencapai tujuannya hanya tertuju pada bagaimana untuk dapat menunjukkan hasil pemenuhan target keuangan yang tinggi dengan menggunakan cara yang tidak benar (Andhika *et al.*, 2024).

Terdapat penelitian terdahulu berkaitan dengan target keuangan yang dilakukan oleh Kusumosari & Solikhah (2021) dan Andhika *et al.,* (2024) menyatakan bahwa target keuangan yang di proksikan dengan *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2021) dan Humaira *et al.,* (2024) menyatakan bahwa target keuangan yang di proksikan dengan *return on assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Faktor pendeteksi kecurangan laporan keuangan selanjutnya adalah Pergantian auditor. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang sangat berkaitan erat dengan masalah pencegahan tindakan *fraud* adalah auditor internal. Dengan adanya auditor

internal, dapat bermanfaat dalam membantu mencegah terjadinya *fraud*. Namun, auditor internal tidak dapat bertanggung jawab atas terjadinya *fraud* walaupun dalam hal ini auditor internal adalah pihak yang memiliki kewajiban paling besar dalam masalah pencegahan *fraud* (Arifin, 2020). Pihak auditor internal tidak dapat memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena internal auditor merupakan bagian dari pihak dalam perusahaan (Soesanto *et al.*, 2023).

Sementara auditor eksternal atau akuntan publik (AP) adalah pihak yang berasal dari luar perusahaan dan dianggap memiliki integritas serta kemahiran profesional melalui penilaian secara kritis terhadap bukti audit yang dikumpulkan. Akuntan publik bertanggung jawab untuk merencanakan dan juga melaksanakan audit dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan perusahaan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Dahliawati, 2022). Namun kerap terjadi kasus yang melibatkan akuntan publik (AP) dalam dugaan manipulasi laporan keuangan. Sehingga salah satu cara untuk mencegah timbulnya *fraud* yang diakibatkan karena adanya persekongkolan antara akuntan publik (AP) dengan perusahaan, adalah dengan dikeluarkannya aturan dalam memperketat pengawasan terhadap auditor eksternal tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan PP Nomor 13 tahun 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) dalam kegiatan jasa keuangan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari akuntan publik (AP) paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Berikut adalah tabel data pergantian auditor pada Sektor Pertambangan periode 2019-2023:

Tabel 1. 4
Pergantian Auditor Pada Sektor Pertambangan Periode 2019-2023

Kode Perusaahaan	Periode Laporan Keuangan				
	2019	2020	2021	2022	2023
ADRO	1	0	0	1	0
BRMS	1	1	1	1	1
BTON	0	0	1	0	0
ELSA	0	0	1	0	1
INCO	1	0	0	1	0
MBAP	0	1	1	1	0
PTBA	1	0	0	1	0
RUIS	0	1	1	0	0
TBMS	1	1	0	0	1

Keterangan:
1= Perusahaan melakukan pergantian auditor
0= Perusahaan tidak melakukan pergantian auditor

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Tabel 1.4 merupakan data pergantian auditor pada perusahaan sektor pertambangan. Berdasarkan data yang diolah oleh peneliti dengan melibatkan 9 perusahaan terkait dengan praktik pergantian auditor, dapat terlihat bahwa seluruh perusahaan telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa perusahaan harus melakukan pergantian akuntan publik (AP) setelah masa kerja maksimal 3 tahun buku berturut-turut untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan audit. Namun setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus *f-Score model* dalam rangka mengetahui apakah perusahaan terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan, menghasilkan bahwa 8 dari 9 perusahaan tersebut memiliki risiko di atas normal atau > 1 terhadap kecurangan laporan keuangan. Salah satunya seperti perusahaan dengan kode saham BRMS, walaupun perusahaan telah

mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pergantian auditor namun hasil dari *F-Score* BRMS adalah 1,9125 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diklasifikasikan sebagai perusahaan yang terindikasi melakukan *fraud* dikarenakan 1,9125 > 1. Dapat terlihat pada tabel, bahwa perusahaan dengan kode BRMS sering melakukan pergantian auditor bahkan pada setiap tahun buku pelaporan. Menurut Setyono *et al.,* (2023), pergantian auditor oleh perusahaan bisa menjadi suatu upaya untuk menyembunyikan kecurangan laporan keuangan yang telah dilakukan sehingga hal tersebut dapat menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang terjadi di masa lalu akibat adanya keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang terbatas dari auditor yang baru.

Terdapat penelitian terdahulu berkaitan dengan pergantian auditor yang dilakukan oleh Setyono *et al.,* (2023) dan Loen (2023) menyatakan bahwa pergantian auditor yang di proksikan dengan variabel dummy berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Yuliati (2022) dan Angelita & Hasnawati (2023) menyatakan bahwa pergantian auditor yang di proksikan dengan variabel dummy tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terkait pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan variabel target keuangan dan pergantian auditor. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan dengan judul: **"PENGARUH TARGET KEUANGAN DAN PERGANTIAN AUDITOR TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
2. Seberapa besar pengaruh pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
3. Seberapa besar pengaruh target keuangan dan pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh target keuangan dan pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu Akuntansi terkait *fraud*, terkhusus pada *fraud* laporan keuangan dengan menggunakan target keuangan dan pergantian auditor sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalur untuk penelitian lebih lanjut. Misalnya, para akademisi dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk studi yang lebih mendalam atau untuk mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang mungkin berkontribusi pada kecurangan laporan keuangan.

b. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, terkhusus pada upaya memahami lebih faktor-faktor dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini menggunakan situs resmi Bursa Efek Indonesia sebagai tempat untuk pengumpulan data laporan tahunan perusahaan Sektor Pertambangan pada periode 2019-2023. Berikut adalah waktu penelitian yang dilakukan:

Tabel 1. 5
Waktu Penelitian

No.	Keterangan	2024																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Penelitian																				
2	Pengajuan Judul																				
3	ACC Judul																				
4	Penyusunan Proposal BAB I																				
5	Penyusunan Proposal BAB II																				
6	Penyusunan Proposal BAB III																				
7	Pengajuan Seminar Proposal																				
8	Seminar																				
9	Revisi Proposal Skripsi																				
10	Penyusunan BAB IV																				
11	Penyusunan BAB V																				
12	Sidang & Yudisium																				
13	Revisi Skripsi																				

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)